

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 25 Juni 2025

ACARA :

**PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PERUBAHAN APBD (P-APBD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

“PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PONOROGO (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2025.”

H a r i : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo

Jenis Rapat : Rapat Paripurna

Sifat rapat : Terbuka untuk umum

Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)

Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 7 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 8 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 3 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 4 Orang;

5. Fraksi Partai Demokrat	: 4 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 2 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 32 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Fikso Rubianto
5. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
6. Mahfut Arifin, S.Sos.
7. Mujiatin
8. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
9. Evi Dwitasari, S.Sos.
10. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
11. Siswandi
12. Teguh Pujiyanto
13. Riyanto, S.IP.
14. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
16. Agus Subiyantoro
17. Pamuji, S.Pd.
18. Agus Mustofa Latief H.
19. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
20. Eka Rekno Setyani, S.H.
21. Anik Suharto, S.Sos.
22. Ghufro Ridlo'i
23. Agus Suwito
24. Elvis Wibisono
25. Widodo, S.H.
26. Yuliana
27. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
28. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
29. Christine Hery Purnawaty, S.E.
30. Abu Kohar
31. Ribut Riyanto, S.H.
32. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 2 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 4 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 1 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 3 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 13 Orang

Yaitu :

- 1. Mashudi
- 2. Sunyoto. S.Pd.
- 3. Dr. Burhanudin
- 4. Mukridon Romdloni, S.T.
- 5. Sukirno
- 6. Sunarto, S.Pd.
- 7. Isnani, S.Pd.
- 8. Drs. Mulyono
- 9. Imam Mustofa
- 10. Binti Rahmawati, S.Pd.
- 11. Ayatulloh Ali Syariáti, S.H.
- 12. Kateni. S.H.
- 13. Muryanto, S.IP.

Eksekutif yang hadir :

- 1. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. : Bupati Kabupaten Ponorogo;
- 2. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M. : Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
- 3. Sriyono : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
- 4. Dhony Prasetyo N : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;
- 5. Bayu Susanto : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
- 6. Besse Tenrisampeang : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;
- 7. Tri Susilo : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
- 8. R.R. Yeni W : Dinas Pendidikan kabupaten Ponorogo;
- 9. drg. Heni Lestari : RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
- 10. Nora Y. Apt : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;

- | | |
|-------------------------|---|
| 11. Lia Febriah | : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo; |
| 12. Sari W. | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo; |
| 13. Myna | : Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo; |
| 14. Muhrodi | : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo; |
| 15. Alim Faizin | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo; |
| 16. Budi Jatmoko | : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo; |
| 17. Suwanto | : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; |
| 18. Eko Bagus P. | : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo; |
| 19. Arief K. | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo; |
| 20. Anang | : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Madiun; |
| 21. Tauhid | : Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 22. Tya | : Kecamatan Babadan; |
| 23. Sugeng P. | : Kecamatan Sampung; |
| 24. Sigit P. | : Kecamatan Badegan; |
| 25. Mudhofir | : Kecamatan Jenangan; |
| 26. Tiena Sulistiyorini | : Kecamatan Ngebel; |
| 27. Agus Hermansyah | : Kecamatan Sooko; |
| 28. Rifa Alfiany S. | : Kecamatan Pudak; |
| 29. Muwarto | : Kecamatan Sawoo; |
| 30. Slamet S. | : Kecamatan Jetis; |
| 31. Kamsun | : Kecamatan Sambit; |
| 32. Jemana | : Kecamatan Mlarak; |
| 33. Supratman | : Kecamatan Ngrayun; |
| 34. Taryono | : Kecamatan Slahung; |
| 35. Heru Pramono | : Kecamatan Bungkal. |

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;
Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;
Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu
Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

**“PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN
ANGGARAN 2025.”**

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	32 orang
Tidak Hadir	13 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: Jumlah	8 orang
	Hadir	7 orang
	Tidak hadir	1 orang, dengan keterangan sbb
	1. Mashudi	IJIN

2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : Jumlah 10 orang
Hadir 8 orang
Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
1. Sunyoto, S.Pd. IJIN
2. dr. Burhanudin IJIN
3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
Hadir 3 orang
Tidak Hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :
1. Mukridon Romdloni, S.T. IJIN
2. Sukirno IJIN
3. Sunarto, S.Pd. IJIN
4. Isnani, S.Pd. IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
1. Drs. Mulyono IJIN
2. Imam Mustofa TK
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Binti Rahmawati, S.Pd. IJIN
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 2 orang
Tidak hadir 3 orang, dengan keterangan sbb :
1. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H. IJIN
2. Kateni, S.H. TK
3. Muryanto, S.IP. TK
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025.”

Hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo, Bapak H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.;

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo;

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo;

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dalam keadaan sehat wal’afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal ‘Aalamiin...

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan;

1. Pasal 317 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menuangkannya dalam suatu Peraturan daerah;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia **Nomor 900.1.1/640/SJ** tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor **900.1/KH/1640/405.24/2025** tanggal 20 Juni 2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Serta sesuai dengan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo maka agenda rapat paripurna pada hari ini adalah **PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (c), maka rapat telah memenuhi ***kuorum***.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH...**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (KETUK PALU 3 X) rapat dibuka pukul 14.38 WIB.

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, penyusunan Perubahan APBD merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan berbagai dinamika pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan, serta berbagai faktor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan dan belanja daerah.

Dalam kesempatan ini, seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Ponorogo akan menyampaikan pandangan, masukan, saran, maupun catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pandangan-pandangan tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran di Kabupaten Ponorogo. Kami berharap, melalui agenda ini akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Untuk itu, kepada juru bicara Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo, kami persilakan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya secara bergiliran.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi, kami persilakan kepada:

- 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,** untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.
Dipersilakan.

(Setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudari Tri Suryati, A.Md. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya kami persilahkan dari Fraksi:

- 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN,** dipersilahkan;

(Setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Teguh Pujiyanto yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

- 3. Fraksi Partai NasDem,** dipersilahkan;

(Setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Agus Subiyantoro yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

- 4. Fraksi Partai Gerindra,** dipersilahkan;

(Setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

- 5. Fraksi Partai Demokrat,** dipersilahkan;

(Setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudari Yuliana yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

- 6. Fraksi Partai Golkar,** dipersilahkan;

(Setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Eko Priyo Utomo, S.T., M.E. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

- 7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera,** dipersilahkan;

(Setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudari Christine Hery Purnawaty, S.E. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, berdasarkan **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025**, Gubernur/Bupati/Walikota diminta untuk segera mengajukan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD, paling lambat minggu pertama bulan Juli. Oleh karena itu, pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 harus dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Juni Tahun 2025 dengan agenda **“JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025.”**

Untuk itu, kami mengharapkan kehadiran kembali seluruh pihak yang terkait pada tahapan-tahapan selanjutnya, agar proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta selaras dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo.

PENUTUP

Demikian seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan dengan tertib, lancar, dan penuh tanggung jawab. Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Dewan, Bupati Ponorogo beserta jajaran Pemerintah Daerah, serta para tamu undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat dengan seksama.

Sebagai pimpinan rapat, kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan sidang hari ini mungkin terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyampaian maupun tata kelola rapat. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan sebesar-besarnya.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAH RABBIL ‘ALAMIN.

XXX (KETUK PALU 3 KALI)

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu’alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PONOROGO (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2025.”

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 25 Juni 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 25 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG PERUBAHAN APBD
KABUPATEN PONOROGO (P-APBD) TAHUN
ANGGARAN 2025**

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 25 Juni 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA



**PANDANGAN UMUM FRAKSI KEBANGKITAN
BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO**

Terhadap

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PONOROGO
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 25 Juni 2025

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah dan Segenap Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo.

Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Segenap OPD Di lingkungan Pemkab. Ponorogo

Sidang Paripurna yang terhormat

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT, atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas kita.. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teriring doa semoga kita mampu meneladani beliau dalam melaksanakan tugas pelayanan kita kepada masyarakat.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Pimpinan dan Sidang Paripurna yang terhormat

Sebelum kita mulai pembahasan berkenaan Fraksi PKB mengucapkan terima kasih atas telah direalisasikannya anggaran BPPDGS (Bosda Madin), yang pada tahun tahun sebelumnya hanya sebanyak 6 bulan yang bersumber dari PABD Provinsi, tahun ini Kabupaten Ponorogo telah memberikan sharing Bosda Madin sebanyak 3 bulan. Semoga tahun depan kita bisa menyempurnakannya menjadi 12 bulan. Kami yakin program ini akan sangat membantu para pelaku pendidikan diniyah non formal dan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan manusia di Ponorogo.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Pimpinan dan Sidang Paripurna yang terhormat

Fraksi Kebangkitan Bangsa telah mempelajari nota keuangan Rancangan perubahan APBD kabupaten ponorogo tahun 2025 yang disampaikan oleh wakil Wakil Bupati pada rapat paripurna DPRD tanggal 24 Juni 2025 yang lalu. Yang mana dapat disimpulkan :

1. Pendapatan daerah Pendapatan daerah berubah menjadi sebesar rp.2.491.501.965.657,60 (dua triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah). naik sebesar 2,20 % dari APBD induk
2. Belanja daerah sebesar rp.2.623.905.264.796,84 (dua triliun enam ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh empat

rupiah) naik sebesar 10,03 % dari APBD induk

3. Defisit anggaran sebesar rp.132.403.299.139,24 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah) yang pada APBD induk diproyeksikan surplus sebesar Rp 48.514.983.400,00 (Empat puluh delapan milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Dari angka angka tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan akan tetapi juga terjadi peningkatan belanja yang lebih besar. Yang mana belanja operasi masih mendominasi belanja sebesar 1,8 triliun

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Pimpinan dan Sidang Paripurna yang terhormat

Semua pihak memaklumi bahwa Perjalanan APBD kita di tahun 2025 ini diawali dengan adanya intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang sedikit banyak berpengaruh kepada APBD. Akan tetapi pengaruh signifikan hanya terjadi pada DAK fisik sedangkan dana transfer intensif Fiskal dan Transfer Dana Bagi Hasil justru meningkat signifikan

Peningkatan pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan yang cukup menciptakan optimisme tersendiri, Mengingat cita-cita PAD 1 triliun dan kemandirian fiskal kabupaten telah menjadi cita-cita bersama. Fraksi PKB mencermati ada beberapa sumber pendapatan yang belum di-intensifikasi secara maksimal.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Pimpinan dan Sidang Paripurna yang terhormat

Fraksi PKB kembali mengingatkan bahwa tema pembangunan kita di tahun 2025 ini adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif, melalui pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan penunjang sarana perhubungan dan peningkatan RTH, penguatan UM yang didukung SDM serta aparatur profesional”

Fraksi Kebangkitan bangsa mendorong agar arah kebijakan belanja kabupaten di tahun 2025 setelah perubahan ini tetap berpedoman kepada tema pembangunan di atas serta mendorong untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penganggaran belanja, mengupayakan tercapainya prioritas pembangunan kabupaten dengan tetap mengedepankan paradigma *money follow program*

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Pimpinan dan Sidang Paripurna yang terhormat

Selanjutnya untuk memperdalam pembahasan rancangan Perubahan APBD ini Fraksi PKB mengajukan beberapa usulan dan pertanyaan yang selengkapnya termuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pandangan umum ini.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2025. Terimakasih atas perhatian dan mohon ma'af atas segala kekurangan.

Wallohu l muwafiq ila aqwam lthoriq

Wassalamu alaikum wr...wb...

Ponorogo, 25 Juni 2025

Pimpinan

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

MUJIATIN

TRI SURYATI, A.Md

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 25 Juni 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN

PANDANGAN UMUM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025



FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025

**FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025**

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmattullohi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Rahayu

M E R D E K A !!!

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo...

Bupati, Wakil Bupati beserta segenap unsur FORKOMPIMDA Kabupaten Ponorogo...

Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD...

Rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi, Insan Pers, serta hadirin undangan yang berbahagia...

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri taulan Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang selalukita nantikan safa'atnya di yaumul qiyamah, allohuma amin.

Sidang Dewan yang terhormat.

Sebelum mengawali penyampaian Pandangan umum kami, Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Perayaan Grebeg Suro Tahun 2025, semoga kita sebagai generasi penerus dapat untuk melestarikan budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kami Fraksi PDI Perjuangan maPAN sangat mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas namun tidak mengurangi kemeriahan Grebeg Suro tahun ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu agenda Daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan, dalam rangka penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel, yang disusun berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

Secara prinsip Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berjalan dengan mempertimbangkan pencapaian target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan, baik dari sisi Pendapatan maupun dari sisi Belanja dan pembiayaan daerah.

Sidang Dewan yang terhormat.

Mulai tahun 2025 ada perubahan dalam pengelolaan dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB). Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Keuangan Daerah mengatur bahwa dana bagi hasil PKB dan BBNKB tidak lagi dikelola kas provinsi, melainkan langsung ditrasfer ke kas Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan komposisi 64% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, 36% untuk Pemerintah Provinsi.

Dengan adanya dana bagi hasil ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik, oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan maPAN berharap regulasi ini dapat dioptimalkan, sehingga Pendapatan Asli Daerah meningkat dan PAD 1 Triliyun dapat tercapai sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah Kab. Ponorogo

Sidang Dewan yang terhormat

Setelah mencermati Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, Fraksi PDI Perjuangan maPAN setuju dengan Raperda tersebut dan kami mendukung sepenuhnya untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya.

Sidang Dewan yang terhormat

Terkait dengan Raperda tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, izinkanlah Fraksi PDI Perjuangan maPAN menyampaikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Mohon rincian, PAD yang berasal dari dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ?
2. Mohon penjelasan perkembangan rencana pemekaran Desa, khusus desa-desa yang ada di Kecamatan Ngrayun ?
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo ditahun 2025 akan melakukan pinjaman dari PEN sebesar 100 M yang akan digunakan untuk perbaikan Infrastruktur jalan, mohon perincian beserta lokasi jalan-jalan tersebut?
4. Dalam rangka pengelolaan sampah yang baik dan tidak mengganggu masyarakat, kami Fraksi PDI Perjuangan maPAN berharap kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran peremajaan bak kontainer sampah
5. Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah terkait Sekolah Rakyat?

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap usul persetujuan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terimakasih atas perhatian serta mohon maaf apabila ada hal hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan Ponorogo Hebat. Aamiin YRA

Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Salam
Sejahtera bagi kita semua, Rahayu...

Ponorogo, 25 Juni 2025

**FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

Ketua

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP

Siswandi

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025**

Rabu, 25 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM**



PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(NasDem)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO**

TERKAIT

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

PONOROGO, 25 JUNI 2025

Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Salam Restorasi Indonesia !!!!

- **Yth. Bpk. H.Sugiri Sancoko, S.E, M.M. Bupati Ponorogo**
- **Yth. Ibu Hj Lisdyarita, S.H Wakil Bupati Ponorogo**
- **Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo**
- **Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati**
- **Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo**
- **Yth. Rekan – rekan pers serta hadirin undangan yang berbahagia**

Mengawali Pandangan umum fraksi ini marilah bersama – sama kita panjatkan Puji dan syukur kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini masih dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi – Fraksi terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah Ponorogo ini dengan keadaan sehat wal afiat dan tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Berikut ini beberapa Pandangan umum Fraksi Partai NasDem Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo : **Mengenai Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.**

Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari

tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hakikatnya adalah target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah mempelajari Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ijin Fraksi NasDem memberikan beberapa masukan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana progres pelaksanaan APBD induk terkait bidang infrastruktur daerah serta berapa jumlah dan rinciannya ? **(Mohon Penjelasan)**
2. Bagaimana rencana pemerintah terhadap Silpa sejumlah 87 Milyar Rupiah, mohon penjelasan peruntukannya untuk infrastruktur apa saja, berada dimana dan berapa saja nilainya.
3. Rencana Pembiayaan yang bersumber dari hutang bank jatim , pemda harus memastikan dalam hal perencanaan , pelaksanaan dan monitoring dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, oleh sebab itu Fraksi NasDem DPRD Ponorogo menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perlu kajian mendalam dampak yang ditimbulkan.
 - b. Dipastikan penggunaannya tidak bergeser dari yang disampaikan TAPD di forum banggar DPRD Ponorogo.
 - c. Pemerataan lokasi secara obyektif, sekala prioritas serta azas keadilan di semua wilayah Kabupaten Ponorogo.
 - d. Memastikan pelaksanaannya dengan baik , tepat waktu, tepat volume dan tepat secara kualitas.
 - e. Dalam hal pelaksanaan harus melibatkan pengusaha kecil lokal

4. Terkait pengelolaan aset pemerintahan daerah baik aset tetap ataupun aset bergerak, ada berapa jumlahnya dan siapa saja yang mengelola aset tersebut? **(Mohon Penjelasan)**
5. Salah satu buah reformasi adalah demokratisasi, oleh sebab itu semua pihak wajib menghormati kebebasan berpendapat seperti yang sudah tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, fraksi NasDem menyayangkan dan turut prihatin terhadap pembubaran mimbar bebas yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa beberapa waktu lalu, ke depan pemda , aparat dan semua stakeholder harus memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi.
6. Fraksi NasDem mengharapkan adanya perbaikan sistem retribusi Parkir tepi jalan raya untuk penambahan PAD, Sistem retribusi parkir yang ada saat ini seringkali bocor akibat kurangnya pengawasan dan transparansi. Juru parkir ilegal, tarif yang tidak sesuai, dan kurangnya bukti pembayaran yang jelas menjadi faktor kurang maksimalnya hasil pendapatan dari retribusi Parkir.

Hadirin, Sidang paripurna yang berbahagia

Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana atau anggaran belanja, bahkan sebaliknya tidak menutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan dalam tahun anggaran berjalan.

Pada akhir Pandangan Umum ini fraksi NasDem sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini ke tingkat pembahasan lanjutan. Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap Raperda ini kami sampaikan.

Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. **Billahi Taufiq Wal- Hidayah Wassalamu'alaikum wr. Wb.**

Ponorogo , 25 Juni 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo

Fraksi Partai NasDem

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

SUNARTO, S.Pd

MUKRIDON ROMDLONI, S.T

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jum'at, 04 Juli 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



TERHADAP
USUL PERSETUJUAN RANCANAGN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO, TERKAIT :
ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO
TA-2025

PONOROGO, 25 JUNI 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Salam

Indonesia Raya !!!!

- Yth. Bpk. H.Sugiri Sancoko, S.E, M.M. Bupati Ponorogo
- Yth. Ibu Hj Lisdyarita, S.H Wakil Bupati Ponorogo
- Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Rekan – rekan pers serta hadirin undangan yang berbahagia

Mengawali Pandangan umum fraksi ini marilah bersama – sama kita panjatkan Puji dan syukur kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini masih dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,
Berikut ini beberapa Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo : ***Mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Ponorogo***

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya,

baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh PemKab ponorogo yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah mempelajari isi Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan eksekutif, kami Fraksi Gerindra memberikan beberapa masukan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Kami Fraksi Gerindra Menanyakan terkait anggaran terhadap ;
 - A. ADD sudah berapa persen pada Tahun Anggaran 2025
 - B. Anggaran penanganan stunting
 - C. Total anggaran bantuan ke RT dan berapa masing-masing RT.
 - D. Anggaran BKKD disemua jenis kegiatan.
 - E. Anggaran hibah untuk Madin
 - F. Anggaran Belanja infrastruktur
2. Persiapan apa yang sudah dan akan dilakukan PemKab ponorogo terkait pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau UU ASN. pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, utamanya yang berkaitan dengan anggaran? **(Mohon dijelaskan)**
3. Sejauh mana anggaran belanja pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 ini berpihak pada pendidikan yang masih berbayar, kesehatan dan infrastruktur? Program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan ketiga program tersebut? **(Mohon dijelaskan).**
4. Berapa anggaran untuk kegiatan Grebeg Suro tahun ini? Rinci dan jelaskan.
5. Untuk apa anggaran sejumlah Rp. 2.491.501.965.657,60 (DUA TRILIUN EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS

ENAM PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH KOMA ENAM PULUH)?
Rinci dan jelaskan.

***Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang
berbahagia,***

Pada akhir Pandangan Umum ini fraksi Gerindra sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 ke tingkat pembahasan lanjutan, dengan terus perkuat sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap rancangan peraturan daerah Ponorogo ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Ponorogo , 25 JUNI 2025

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
DPRD Kabupaten Ponorogo

ttd.
Drs. MULYONO
KETUA

ttd.
REYFAL BAYU ADJI PRAMBODHO
SEKRETARIS

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 25 Juni 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT



PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

TERKAIT

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**



**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

RABU, 25 JUNI 2025



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO
TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PONOROGO
TAHUN 2025**

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokompida) Kabupaten Ponorogo

Yang kami hormati, Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor Instansi, Vertikal dan Komponen Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta Hadirin Undangan yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT, berkat nikmat-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna kali ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiyullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati Nota Keuangan dan Draf Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maupun penjelasan saudara Wakil Bupati Ponorogo pada Rapat Paripurna tanggal 24 Juni 2025 kemarin, ada beberapa saran, pendapat, maupun pandangan yang kami sampaikan:

1. Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami dengan penyusunan lebih awal, P-APBD Tahun 2025 mampu menjawab tantangan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
2. Kami juga mengapresiasi atas rencana kenaikan estimasi PAD sebesar 8,01% pada P-APBD Tahun 2025. Menurut kami semua hal positif yang harus terus di jaga dan ditingkatkan. Namun juga harus dibarengi dengan strategi untuk menekan seminim mungkin kebocoran PAD.
3. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD Tahun Anggaran 2025 ini. Di beberapa SKPD mulai Dinas, Badan, Puskesmas Kecamatan, dan Kantor Kecamatan ada pos belanja yang pada APBD murni tidak dianggarkan, namun pada P-APBD dianggarkan maupun penambahan anggaran. Harapan kami penganggaran dan penambahan pos belanja tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Pada kesempatan ini perlu kiranya kami sampaikan, terkait rencana Pemerintah Daerah melakukan pinjaman ke PT. Bank Jatim sebesar Rp 100 Milyar untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan. Perlu kami tanyakan apakah kemampuan fiskal kita ke depan mampu untuk membiayai

cicilan pinjaman tersebut, mengingat saat ini Pemerintah Daerah juga masih memiliki tanggungan pinjaman PEN kepada PT SMI. Apakah rencana ini sudah dilakukan pengkajian mendalam?Mohon Dijelaskan!. Karena apabila ini dilaksanakan tentu akan berpengaruh pada kemampuan kapasitas fiskal Kabupaten Ponorogo ke depan.

5. Beberapa pertanyaan terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 kami lampirkan dan menjadi lembaran yang tidak terpisahkan dari Pandangan Umum ini.

Hadirin yang berbahagia,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Ponorogo terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, untuk selanjutnya apabila dalam penyampaian kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekian

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Ponorogo, 25 Juni 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

WIDODO, SH.

AGUS SUWITO

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 25 Juni 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

TERHADAP

**USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG :**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-
APBD)**

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025

PONOROGO, 25 JUNI 2025



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

FRAKSI PARTAI GOLKAR

Jln. Aloon-aloon Timur No. 29 Telp (0352) 483864, Fax (0352) 483262

PONOROGO 63413

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

- Yth. Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko / yang mewakili, Sekretaris Daerah, beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Ponorogo ;
- Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo ; Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo
- Yth. Bapak/ibu Camat, Sekretaris Dewan, dan rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi, Wartawan serta seluruh undangan Rapat Paripurna yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, karunia dan perlindungan-nya yang kepada kita semua saat ini sehingga kita dapat menghadiri acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak, aamiin. Dalam kesempatan ini, izinkan kami dari Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap **PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (P – APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pandangan Umum pada hari ini, berdasarkan penyampaian Bupati Ponorogo pada Rapat Paripurna yang lalu tentang **PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (P – APBD) KABUPATEN PONOROGO 2025**, kami dari Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Raperda tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kami mendukung sepenuhnya untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya. Adapun secara umum Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami dari Fraksi Partai Golkar pada intinya senantiasa mendorong dan mengapresiasi Pemerintah Daerah atas penyusunan **P – APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025** yang komprehensif dan terintegrasi dengan rencana

pembangunan nasional. Kami memandang bahwa langkah Pemerintah Daerah dalam menyusun P – APBD adalah bentuk komitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah. Kami juga mengapresiasi upaya penyesuaian anggaran yang diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas.

2. Selanjutnya mohon kami dijelaskan tentang :

- a. Terkait Pendapatan Daerah, bagaimana peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD? ***Mohon penjelasannya.***
- b. Terkait Belanja Daerah, bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa penambahan anggaran belanja dalam P – APBD benar-benar mendukung program prioritas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? ***Mohon penjelasannya.***
- c. Terkait Pembiayaan Daerah, mohon kami dijelaskan tentang apa saja komponen yang berubah dalam P – APBD, dan bagaimana Pemerintah Daerah memastikan penggunaan biaya tersebut tidak membebani APBD di masa mendatang? ***Mohon penjelasannya.***
- d. Terkait Transparansi dan Akuntabilitas, mohon kami dijelaskan terkait langkah-langkah mitigasi risiko dan program-program baru dalam P – APBD? ***Mohon penjelasannya.***
- e. Terkait Penanganan Isu Strategis Daerah, mohon kami dijelaskan bagaimana P – APBD ini menjawab tantangan inflasi daerah, terutama dalam hal ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok? Dan apakah alokasi anggaran dalam P – APBD sudah mempertimbangkan langkah- langkah antisipasi terhadap potensi bencana alam, perubahan iklim, dan kerawanan sosial? ***Mohon penjelasaannya.***
- f. Terkait Sektor Kesehatan, mohon kami dijelaskan tentang pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja, dan apakah ada penambahan dukungan untuk program puskesmas keliling atau posyandu? ***Mohon penjelasaannya.***
- g. Terkait Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, mohon kami dijelaskan apakah P-APBD mengakomodasi peningkatan akses air bersih dan sanitasi di wilayah-wilayah yang belum terlayani? ***Mohon penjelasaannya.***
- h. Terkait UMKM dan Ekonomi Kerakyatan, mohon kami dijelaskan sejauh mana dukungan dan anggaran dalam P – APBD untuk pemberdayaan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif? Dan apakah ada kebijakan insentif fiskal atau subsidi yang dirancang dalam P – APBD untuk membantu pelaku usaha kecil pasca dampak ekonomi? ***Mohon penjelasannya.***

Terkait Bantuan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, mohon kami dijelaskan strategi Pemerintah Daerah dalam memadukan bantuan

keuangan pusat, provinsi, dan daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran?
Mohon penjelasannya.

- i. Terkait Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, mohon kami dijelaskan apakah Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah, pencemaran sungai, dan ruang terbuka hijau dalam P – APBD ini? Bagaimana anggaran untuk penanganan potensi kerusakan lingkungan lainnya? ***Mohon penjelasannya.***
- j. Terakhir kami dari **Fraksi Partai Golkar** berharap proses pembahasan P – APBD 2025 ini dapat berjalan dengan lancar, partisipatif, dan mengedepankan semangat transparansi serta akuntabilitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkeadilan. Kami menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan anggaran yang berpihak pada rakyat dan berkelanjutan demi kemajuan daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ponorogo Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P – APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025**. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sekalian dalam mengikuti penyampaian kami, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang secara tidak kami sadari dalam penyampaian ini telah melanggar norma dan etika yang berakibat terhadap perasaan hadirin sekalian.

Salam Sejahtera Bagi kita Semua.

Billahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui,

ttd.

ttd.

EKO PRIYO UTOMO, S.T, M.E
Ketua Fraksi Partai Golkar

AYATULLOH ALI SYARI'ATI, S.H
Sekretaris Fraksi Partai Golkar

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 25 Juni 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN
SEJAHTERA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PEMBANGUNAN Keadilan Sejahtera
DPRD KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) TAHUN
ANGGARAN 2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang terhormat Sdr. Bupati Kabupaten Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E, M.M

Yang terhormat Sdr. Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Hj. Lisdyarita, SH.

Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Sdr. Kepala Dinas, Camat dan hadirin undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dan yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera mengapresiasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dokumen perubahan APBD yang telah diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada 12 Juni 2025. Hal ini mencerminkan semangat sinergi dan komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Adapun substansi perubahan yang disampaikan, mencerminkan dinamika kebutuhan fiskal daerah yang menyesuaikan prioritas pembangunan. Berikut beberapa poin penting yang menjadi perhatian Fraksi PKS:

1. Pendapatan Daerah

Kami mencermati bahwa total pendapatan daerah dalam Raperda P-APBD 2025 direncanakan sebesar **Rp.2.491.501.965.657,60** (*Dua Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Rupiah*). Pendapatan Tersebut Naik Sebesar **Rp.53.712.446.875,60** (*Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah*), meningkat **2,20%** dari APBD murni.

Peningkatan ini terutama didorong oleh Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 36.981.217.782,60 atau naik 8,01%, kenaikan pendapatan transfer sebesar 0,85%.

Fraksi PKS mengapresiasi rencana kenaikan PAD dan terus mendorong untuk tercapainya target tersebut. Namun, kami juga berharap agar Upaya ini tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat. Kami juga berharap sumber pendapatan lain yang sah ke depan dapat dioptimalkan agar struktur pendapatan lebih sehat dan mandiri.

2. Belanja Daerah

Total belanja daerah dalam Raperda P-APBD meningkat menjadi Rp.2.623.905.264.796,84 (*Dua Trilliun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Empat Rupiah*) atau naik 10,03%.

Tentang Belanja Daerah Faksi PKS mengingatkan agar Pemerintah Daerah memperhatikan amanat UU 1 th 2022 terkait proyeksi dalam proporsi di tahun 2027, belanja modal 40%, belanja operasional 30%, belanja pegawai 30%, dan ini rupanya belum menjadi prioritas proyeksi.

Kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam belanja ini, agar pembangunan fisik benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya infrastruktur desa dan pertanian.

Kami menyoroti kenaikan belanja tidak terduga yang naik sebesar 54,83%, diharapkan penggunaan anggaran ini dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip kegawatdaruratan yang jelas.

Kami berharap adanya peningkatan pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran daerah, agar nantinya belanja daerah bisa tepat sasaran.

3. Pembiayaan Daerah

Dari sisi pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar **Rp.187.801.655.872,24** (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Dua Empat Rupiah*), dan pengeluaran sebesar **Rp.55.398.356.733,00** (*Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), sehingga pembiayaan netto sebesar **Rp.132.403.299.139,24** (*Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Empat Rupiah*) yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kami mengingatkan agar anggaran belanja yang ditutup dari pembiayaan tidak bersifat konsumtif dan harus memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Defisit Anggaran

Defisit yang ditimbulkan dalam perubahan APBD ini ditutup sepenuhnya dari pembiayaan netto. Fraksi PKS mendukung langkah ini, namun perlu strategi jangka menengah untuk menghindari pola defisit struktural yang terus-menerus. Kami menegaskan perlunya kehati-hatian dalam mengelola defisit ini agar tidak membebani fiskal daerah di masa mendatang.

Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi PKS memandang bahwa P-APBD ini harus dijadikan momentum untuk:

- Meningkatkan kualitas perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
- Meningkatkan efisiensi belanja daerah dan mengurangi kebocoran anggaran.
- Memperkuat prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.
- Mempercepat transformasi ekonomi desa dan UMKM lokal.
- Menjamin keadilan distribusi anggaran antar kecamatan dan antar kelompok Masyarakat.

Akhirnya, kami berharap Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas secara cermat dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Ponorogo serta kesejahteraan masyarakat.

Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera. Semoga menjadi kontribusi konstruktif dalam perbaikan tata kelola anggaran dan pembangunan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Wallaahumuwaffiq Ilaaqwaamithoriq, Fastabiqul khAirat Billaahi-Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, Rabu, 25 Juni 2025

**FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

KETUA

SEKRETARIS

ttd.

ttd.

CHRISTINE HERY P

UDIN IRCHAMNA